



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS
DIPLOMASI PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2020 - 2024

**Memperkuat Parlemen,
Memperkokoh Kerja Sama Global**

Pengarah:

Dr. H. Fadli Zon (Ketua)

Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus

PUTU SUPADMA RUDANA

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir

Dr. H. Mardani Ali Sera

Ketua Tim Penyusun

Endah T.D. Retnoastuti, SS, Mphil

Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung
Nusantara III lantai 6 Jl. Jend. Gatot
Subroto, Jakarta 10270 Indonesia

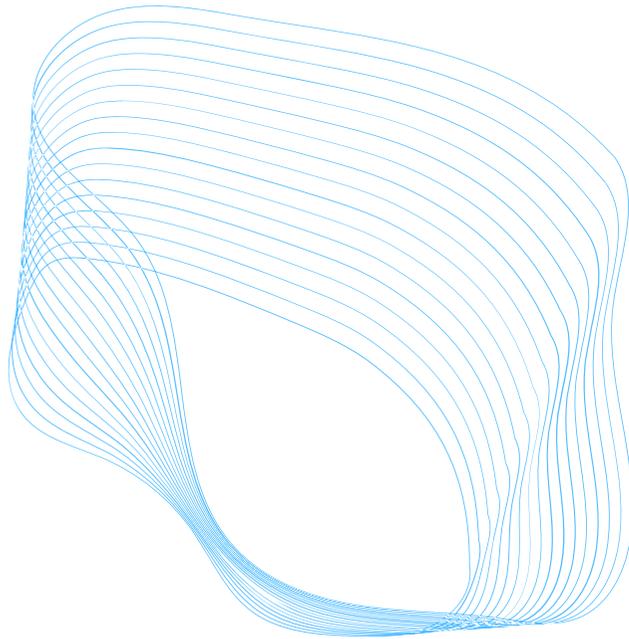
Telepon : +6221 5715813
+6221 5715837
+6221 5715841

Faks : +6221 5732132

Email : biro_ksap@dpr.go.id

Updated in 2023

Daftar Isi



Kata Pengantar Pimpinan BKSAP

Latar Belakang

Visi dan Misi Diplomasi Parlemen DPR RI

Kerangka Strategis

Kegiatan Strategis

Satu : Diplomasi dipimpin oleh Pimpinan DPR RI

Dua : Penguatan Posisi DPR RI di Kancah Internasional

Tiga : Memperkuat Hubungan Bilateral

Empat : Diplomasi Dilakukan oleh Anggota Perseorangan

Lima : Memperkuat Peran Parlemen Dalam Memastikan Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Enam : Mendorong Terwujudnya Perdamaian Dunia dan Stabilitas di Kawasan

Tujuh : Penguatan Kerjasama Parlemen Dalam Kerangka Kerja Kawasan Pasifik

Delapan : Mendukung Keterbukaan Parlemen (Open Parliament)

Sembilan : Digitalisasi Diplomasi Parlemen

Diplomasi Parlemen merespon Pandemi

Faktor/Kondisi Pendukung (Enablers)

Penutup

KATA PENGANTAR PIMPINAN BKSAP

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Menyuarakan aspirasi rakyat yang beragam di kancah internasional telah menjadi komitmen kuat DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR-RI) dengan peran diplomasi parlemen yang dijalankan. Tidak hanya menyuarakan, BKSAP DPR RI juga memastikan politik luar negeri Indonesia sejalan dengan amanah konstitusi (UUD 1945) dalam rangka menyejahterakan rakyat dan berkontribusi aktif dalam memelihara ketertiban dunia. Pada periode 2019-2024 ini, BKSAP DPR RI, sebagai penjuror (focal point) diplomasi parlemen Indonesia, tetap berada dalam garda depan untuk mengawal dan memastikan kepentingan rakyat menjadi komitmen global di setiap forum internasional.

Pelbagai tantangan, kompleksitas, dan ketidakpastian global perlu mendapatkan respon yang melibatkan berbagai pihak terutama parlemen. Persaingan antar negara adidaya serta pelanggaran prinsip multilateral dewasa ini menjadi hambatan besar untuk mencapai kesejahteraan dan kestabilan yang merupakan kepentingan masyarakat internasional. Pada 10 tahun terakhir menjelang tenggat waktu Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Decade of Action), BKSAP DPR RI tetap menjadikan TPB sebagai salah satu basis diplomasi parlemen baik dalam kerangka multilateral dan bilateral. BKSAP DPR RI bersama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memastikan TPB mampu berkontribusi terhadap apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi inklusif, perlindungan Hak Asasi Manusia, pemanfaatan sumber daya maritim yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, pemberdayaan perempuan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat tanpa satu pihak pun tertinggal (No One Left Behind), BKSAP DPR RI menekankan pentingnya aksi kolektif dan semangat kerja sama internasional dalam mencapai TPB melalui berbagai praktik cerdas dan inovasi implementasi TPB terutama dengan negara-negara berkembang melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

KATA PENGANTAR PIMPINAN BKSAP

Penguatan diplomasi parlemen Indonesia dalam merespon pelbagai tantangan global ini tentunya memerlukan kerangka acuan sebagai dasar implementasi diplomasi parlemen melalui penerbitan Rencana Strategis (Renstra) BKSAP DPR RI periode 2019-2024. Renstra ini diharapkan mampu memaksimalkan fungsi diplomasi DPR RI yang sejalan dengan UUD 1945 yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui kepemimpinan DPR RI di berbagai organisasi antar parlemen dan keterbukaan parlemen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR RI) serta para pemangku kepentingan lainnya dalam memajukan politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi parlemen.

Wa'alaikumsalam Warahmatullohi Wabarakatuh

Dr. H. FADLI ZON, S.S., M.Sc.
Ketua BKSAP

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Wakil Ketua BKSAP

PUTU SUPADMA RUDANA, M.B.A.
Wakil Ketua BKSAP

Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR
Wakil Ketua BKSAP

Dr. Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus, B.S., B.A., M.B.A.
Wakil Ketua BKSAP

Latar Belakang

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia secara aktif melaksanakan politik luar negeri dalam kerangka bilateral dan multilateral baik di tingkat regional dan internasional sebagaimana diamanahkan Konstitusi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dasar Hukum

Peran diplomasi DPR RI dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- **Pasal 11 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945** berbunyi "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"; dan selanjutnya **Pasal 20** menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- **Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya **Pasal 71** menyebutkan bahwa DPR RI berwenang untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain; memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
- **Pasal 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri** menyebutkan bahwa dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- **Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000** tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- **Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016** tentang Tata Tertib beserta Perubahannya menegaskan bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan

Visi & Misi Diplomasi Parlemen DPR RI

VISI Diplomasi Parlemen DPR RI periode 2019 – 2024 yaitu:

Terwujudnya postur diplomasi yang disegani dan berlandaskan kepentingan rakyat.

MISI Diplomasi Parlemen DPR RI periode 2019 – 2024 adalah:

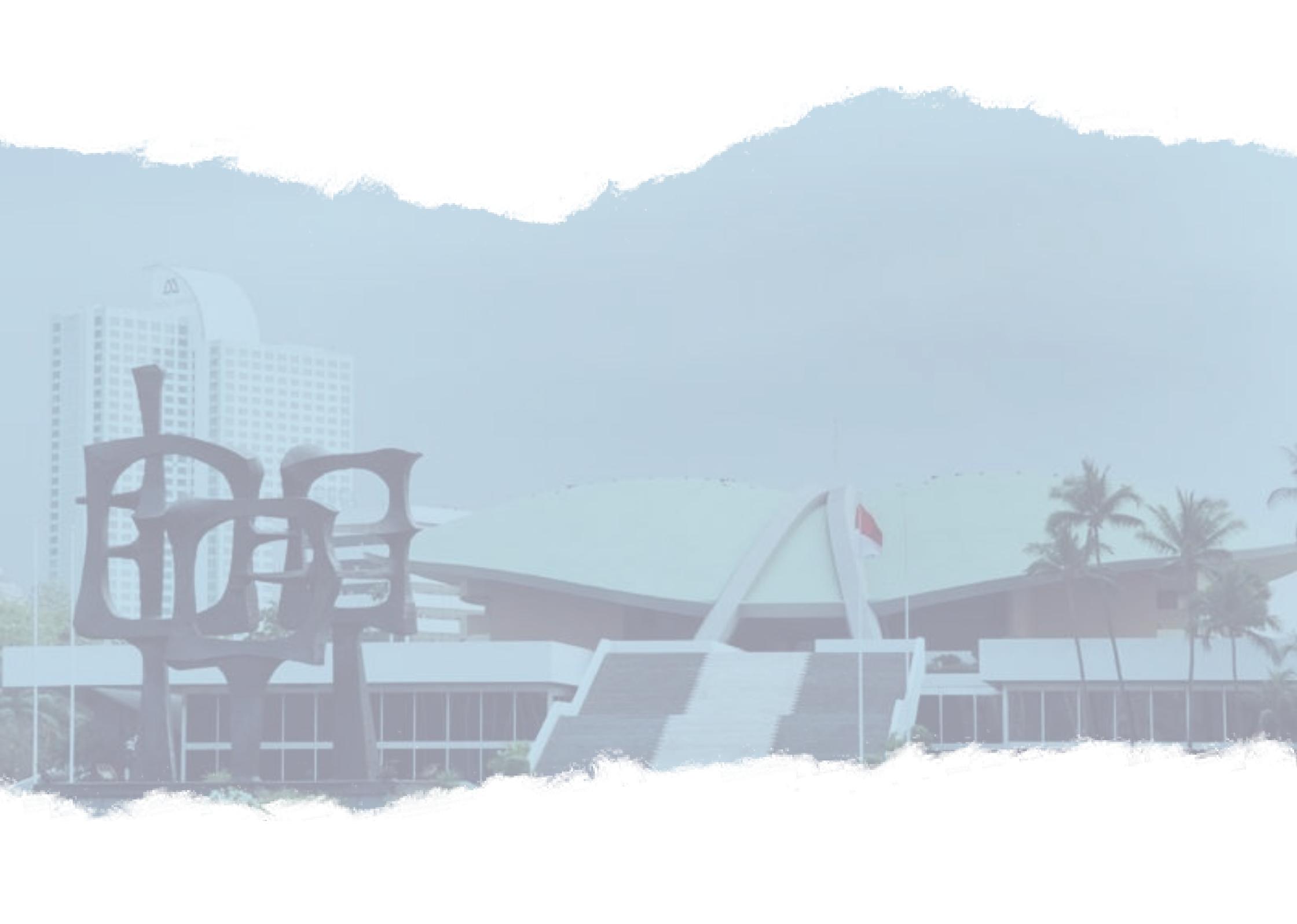
- Mendukung dan memastikan pelaksanaan politik luar negeri sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945
- Meningkatkan peran dan kontribusi kepemimpinan DPR RI dalam berbagai fora internasional dengan mengedepankan kepentingan nasional
- Mewujudkan parlemen yang modern, terbuka, inovatif, dan efektif.



Kegiatan Strategis

Dalam upaya **“Memperkuat Parlemen, Memperkokoh Kerja Sama Global”**, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mengidentifikasi sembilan arah kegiatan strategis yang dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan diplomasi parlemen DPR RI selama lima tahun kedepan. Berikut ini sembilan arah kegiatan strategis dimaksud yang disertai kajian terkait sasaran, ukuran keberhasilan dan keuntungannya.





Satu : Diplomasi dipimpin oleh Pimpinan DPR RI

Meningkatkan komitmen DPR RI dalam melaksanakan diplomasi parlemen untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan tindakan kolektif di forum internasional



Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Tata Tertib DPR RI, Pimpinan DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, sehingga Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR memiliki tugas-tugas yang sama dalam menentukan kebijakan kerja sama antar parlemen dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Berkat wewenangnya tersebut, Pimpinan DPR RI dapat terlibat dalam hubungan internasional untuk membahas isu-isu krusial di tingkat bilateral maupun multilateral yang menjadi kepentingan bersama sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia di forum internasional. Namun demikian, diplomasi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI memiliki nilai strategis dalam meningkatkan citra diplomasi DPR RI.

Pimpinan DPR RI perlu mengembangkan pemahaman dan meningkatkan kerjasama internasional melalui hubungan antar Parlemen dan hubungan antara Parlemen dengan Pemerintah. Keterlibatan Pimpinan DPR RI di luar negeri perlu diperluas melalui kunjungan Ketua DPR/Wakil Ketua DPR ke parlemen negara lain dan melakukan pertemuan tidak hanya dengan Parlemen namun juga pihak-pihak terkait lainnya, dan pertemuan bilateral disela-sela sidang internasional. Pimpinan DPR RI juga perlu memperkuat keterhubungan/ konektivitas dengan para Duta Besar negara-negara sahabat di Ibukota.

Sasaran	Indikator	Manfaat
Kesepahaman antara Indonesia dengan negara sahabat terkait isu strategis yang menjadi perhatian bersama	Tercapainya pengiriman Delegasi Muhibah yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.	Mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dan memperkuat kerjasama dengan parlemen negara lain
	Meningkatnya jumlah kegiatan penerimaan tamu Delegasi Asing di DPR	Meningkatnya reputasi, kredibilitas dan <i>leverage</i> (daya tawar) Indonesia dalam negosiasi internasional

Dua : Penguatan Posisi DPR RI di Kancah Internasional

Partisipasi aktif DPR RI dalam berbagai organisasi antar-parlemen di tingkat regional maupun internasional



Bentuk paling terlihat dari hubungan antar-parlemen adalah keikutsertaan dalam organisasi antar-parlemen baik di tingkat regional maupun tingkat internasional. Organisasi antar-parlemen merupakan forum multilateral yang mengumpulkan para Anggota Parlemen di seluruh dunia untuk membahas isu-isu global, mengusulkan solusi bagi pembangunan internasional, perdebatan atas peristiwa-peristiwa di dunia, serta diseminasi, dan mempromosikan praktek-praktek dan idealisme demokrasi.

Di tingkat internasional dan regional, DPR RI melakukan diplomasi melalui keanggotaan pada organisasi/forum antar-parlemen maupun antar-pemerintah yang memiliki pengaruh kuat di kawasan. Keanggotaan DPR RI dalam organisasi/forum antar-parlemen juga dibedakan berdasarkan lingkup geografis kawasan dan kontribusi tahunan. Untuk organisasi/forum berbayar sehingga keputusan organisasi bersifat mengikat, dan organisasi/forum tidak berbayar sehingga keputusan organisasi bersifat menjalin kebersamaan dan kesepahaman. Organisasi/forum berbayar kontribusi tahunan dimana DPR RI menjadi anggota yaitu yaitu *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*. Sedangkan organisasi/forum parlemen tidak berbayar misalnya *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*, *Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliament (MSEAP)*, *Asia – Europe Parliamentary Partnership (ASEP)*, *Speakers' Consultation of G20 Countries (P-20)*, *Speakers' Consultation of MIKTA Countries (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey, Australia)*, *APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum)*.



DPR RI juga aktif terlibat pada organisasi pemerintah, misalnya ASEAN melalui pertemuan *ASEAN – AIPA Interface Meeting*, PBB melalui *UN Parliamentary Hearing*, *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* melalui *OECD Parliamentary Days*, IMF dan World Bank melalui *IMF/World Bank Parliamentary Network*, *Parliamentary Conference on the World Trade Organization (WTO)*. Organisasi Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi parlemen dan mengundang para Anggota Parlemen untuk turut berperan serta menyampaikan pandangan pada pembahasan berbagai isu yang saat itu menjadi kepentingan bersama negara- negara kawasan

Dengan menjadi anggota berbagai organisasi/forum di tingkat regional dan internasional, DPR RI dapat:

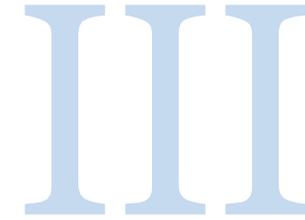
- Berkesempatan terlibat langsung dengan masyarakat internasional dan membangun jaringan kerja
- Berpartisipasi aktif dalam debat-debat global dan menyampaikan gagasan/ide bahkan suatu inisiatif baru dan mengambil peran “*leading role*” untuk menggerakkan arah kebijakan organisasi yang mendukung kepentingan nasional Indonesia
- Berkontribusi dalam pencarian solusi terhadap isu-isu internasional, dan memberikan pengaruh dalam diplomasi parlemen sehingga Indonesia diterima, dipercaya dan diperhitungkan dalam pergaulan internasional.
- Memasukkan agenda kepentingan nasional Indonesia dalam agenda organisasi internasional.
- Menduduki jabatan/ posisi penting dalam berbagai organisasi/forum antar-parlemen
- Memiliki nilai strategis dengan menjadi tuan rumah penyelenggara (*host*) sidang-sidang internasional/ regional, yaitu dapat mempengaruhi dan mengarahkan hasil-hasil keputusan serta menginisiasi gagasan baru yang sesuai dengan kepentingan organisasi dan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia sebagai respon terhadap berbagai isu internasional terkini.
- Mengembangkan profesionalisme pribadi Anggota DPR.

DPR RI ke depan perlu memikirkan peran kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi parlemen agar semakin bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Meningkatkan kepemimpinan DPR-RI di dunia internasional	DPR RI semakin banyak menduduki posisi/jabatan-jabatan penting di organisasi antar Parlemen	Meningkatnya posisi tawar (leverage) dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional
	DPR RI semakin sering menjadi tuan rumah penyelenggara (<i>host</i>) berbagai organisasi parlemen regional/internasional	
	Mengusulkan resolusi/rekomendasi untuk isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia pada sidang internasional	
	Menginisiasi penyelenggaraan sidang/konferensi antar parlemen untuk isu-isu strategis	

Tiga : Memperkuat Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral memberikan peluang kepada DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan mempromosikan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka dan demokratis



Tugas BKSAP antara lain adalah membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen. Untuk memperkuat hubungan bilateral, DPR RI melalui BKSAP membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) atau *Friendship Group* antara DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat. Setiap kegiatan dalam kerangka GKSB DPR RI harus selalu dilakukan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua parlemen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi peningkatan hubungan persahabatan dan kerjasama dalam berbagai bidang.

Pembentukan GKSB DPR-RI dengan parlemen negara sahabat dilakukan berdasarkan pada:

- Asas resiprokal, yaitu DPR RI membentuk GKSB dengan Parlemen Negara sahabat yang juga telah membentuk Friendship Group dengan DPR RI dalam parlemennya.
- Kepentingan strategis antara Indonesia dengan parlemen negara tersebut

Untuk Periode Keanggotaan DPR RI 2019 – 2024, DPR RI telah memperluas lagi hubungan baik dengan berbagai parlemen negara sahabat dengan membentuk 102 GKSB dari berbagai kawasan. Pembentukan GKSB DPR RI merupakan kelanjutan dari kegiatan kerjasama antar parlemen yang dirasakan semakin perlu ditingkatkan berhubung dengan semakin banyaknya persoalan yang dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi antar parlemen. Di samping itu pembentukan GKSB DPR RI merupakan satu wadah bagi para anggota DPR RI untuk melakukan kerjasama bilateral dengan anggota parlemen negara-negara Sahabat.



NO	PARLEMEN NEGARA	NO	PARLEMEN NEGARA	NO	PARLEMEN NEGARA
Asia Tengah		Eropa Timur		Amerika Utara	
1	Kazakhstan	36	Belarusia	69	Amerika Serikat
2	Kyrgyzstan	37	Bulgaria	70	Kanada
3	Uzbekistan	38	Ceko	Amerika Selatan	
Asia Timur		39	Georgia	71	Argentina
4	Jepang	40	Hongaria	72	Brazil
5	Korea Selatan	41	Lithuania	73	Chili
6	Mongolia	42	Makedonia	74	Ekuador
7	Republik R.D. Korea	43	Polandia	75	Kolombia
8	Rep. Rakyat Tiongkok	44	Rumania	76	Peru
Asia Tenggara		45	Rusia	77	Venezuela
9	Thailand	46	Slovakia	78	Suriname
10	Vietnam	47	Ukraina	79	Uruguay
Asia Selatan		Eropa Utara		80	Paraguay
11	India	48	<i>Latvia</i>	Amerika Tengah	
12	Pakistan	49	<i>Denmark</i>	81	Kosta Rika
13	Sri Lanka	50	<i>Finlandia</i>	82	Kuba
14	Iran	51	<i>Norwegia</i>	83	Meksiko
15	Afganistan	52	<i>Swedia</i>	84	Panama
16	Bangladesh	53	<i>Inggris</i>	85	Haiti
Asia Barat		Eropa Selatan		Afrika Utara	
17	Arab Saudi	54	Bosnia Herzegovina	86	Mesir
18	Azerbaijan	55	Italia	87	Maroko
19	Bahrain	56	Kroasia	88	Sudan
20	Irak	57	Portugal	89	Tunisia
21	Kuwait	58	Serbia	90	Aljazair
22	Lebanon	59	Spanyol	Afrika Timur	
23	Palestina	60	Yunani	91	Kenya
24	Syria	Eropa Barat		92	Eithiopia
25	Turki	61	Austria	93	Madagaskar
26	Uni Emirat Arab	62	Belanda	94	Tanzania
27	Qatar	63	Belgia	Afrika Selatan	
28	Yordania	64	Irlandia	95	Afrika Selatan
29	Kesultanan Oman	65	Jerman	96	Namibia
Pasifik		66	Perancis	97	Mauritius
30	Australia	67	Swiss	Afrika Barat	
31	Fiji	68	Uni Eropa	98	Zimbabwe
32	Selandia Baru			99	Senegal
33	Vanuatu			100	Togo
34	Papua Nugini			101	Malawi
35	Kepulauan Solomon			102	Nigeria

Maksud dan tujuan kegiatan GKSB ini antara lain:

1. Untuk menyuarakan kepentingan nasional Indonesia kepada negara sahabat terutama untuk mendorong peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara sahabat. Hal ini merupakan salah satu peran DPR sebagai *second track diplomacy*.
2. Untuk meningkatkan dan mempromosikan hubungan kerja sama keparlemenan kedua negara, terutama untuk bertukar pandangan dalam menjalankan tugas-tugas keparlemenan: legislasi, anggaran, dan pengawasan serta unsur-unsur pendukungnya. Kerja sama tersebut dapat dituangkan ke dalam sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Letter of Intent (LoI)*.
3. Untuk *sharing best practices* terkait isu-isu global yang menjadi perhatian bersama seperti demokrasi, keterbukaan parlemen, SDGs, perempuan, HAM, kejahatan transnasional terorganisasi, korupsi, dll.

Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Mempertajam fokus tujuan kunjungan bilateral DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia	Terlaksananya Pertemuan-pertemuan dengan pejabat tinggi di parlemen negara sahabat dan juga dengan instansi-instansi terkait lainnya	1) Citra dan reputasi positif DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka dan demokratis dihargai dan diakui oleh parlemen negara sahabat sehingga DPR mendapat dukungan dalam berbagai forum internasional, 2) Meningkatkan wawasan dan kapasitas Anggota DPR RI 3) Meningkatnya pemahaman Anggota DPR RI atas isu-isu regional dan global, dan keterlibatan Anggota DPR RI dalam diplomasi
	Jumlah penerimaan delegasi parlemen negara sahabat di DPR RI	
Memperluas koneksi internasional antara Anggota DPR RI dengan dunia internasional	Jumlah GKSB yang terbentuk	
Meningkatnya jejaring Anggota DPR RI dengan anggota parlemen negara sahabat	Jumlah MoU yang disepakati	

Empat : Diplomasi Dilakukan oleh Anggota Perseorangan

Diplomasi Perorangan Anggota memberi kesempatan kepada Anggota DPR RI untuk memperkuat kapasitas individu dan melakukan lobbying dengan lebih fleksibel

IV

Politik luar negeri Indonesia menerapkan *total diplomacy* dengan melibatkan seluruh unsur atau sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Guna mendukung *total diplomacy*, DPR RI terlibat aktif dalam pelaksanaan diplomasi yang merupakan *second track diplomacy* untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, organisasi internasional dan *people-to-people contact* di tingkat regional dan internasional.

Salah satu upaya penguatan diplomasi, DPR RI mempunyai program yang melibatkan seluruh anggota berupa kunjungan kerja perseorangan anggota DPR RI. Melalui diplomasi perseorangan, DPR RI memiliki fleksibilitas dalam mengurai tantangan-tantangan dengan negara sahabat, organisasi internasional terhadap isu-isu terkini yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu kedaulatan, tenaga kerja Indonesia, ekonomi, investasi dan perdagangan, pemberdayaan perempuan, perubahan iklim dan kesehatan global.

Sasaran	Indikator Keberhasilan	Manfaat
Mengembangkan kapasitas setiap individu anggota DPR RI untuk dapat menggali informasi spesifik sesuai dengan bidang tugasnya di DPR RI	Jumlah kunjungan kerja delegasi perseorangan ke negara sahabat.	Memperluas wawasan dan pemahaman tentang isu-isu internasional yang sedang berkembang guna meningkatkan kinerja anggota di parlemen
Menjalin dialog yang efektif dengan parlemen negara sahabat atau pihak-pihak terkait untuk isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia		Mengubah pandangan/ <i>mindset</i> pihak lain terhadap Indonesia dengan mendukung penyelesaian isu-isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia
Menjembatani isu-isu yang menjadi <i>pending matters</i> dan strategis dengan <i>counterparts</i> /pihak-pihak yang ingin ditemui		<i>Lobbying</i> menjadi lebih fleksibel dan membuka alternatif solusi yang lebih baik

Lima : Memperkuat Peran Parlemen Dalam Memastikan Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Parlemen dan anggota parlemen adalah elemen kunci dalam memastikan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Signifikansi keterlibatan parlemen termaktub dalam *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebut parlemen penting dalam aspek *means of implementation* (paragraf 45), keterlibatan komprehensif parlemen (paragraf 52), dan *regular and inclusive review of progress* (paragraf 79).

Pengakuan peran parlemen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memberikan momentum baru bagi anggota Parlemen bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan; yang selayaknya tidak berbeda dengan lintasan pembangunan nasional. Parlemen berada di garis depan inisiatif ini karena mereka memainkan peran penting dalam memenuhi persyaratan tersebut melalui fungsi pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. Selanjutnya, peran mereka dalam mengawasi pemerintah untuk bertanggung jawab selama proses dan pelaksanaan TPB/SDGs, memastikan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.

Di periode 2019 – 2024, BKSAP DPR-RI memiliki komitmen untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) mensosialisasikan sekaligus mengarusutamakan *goal-goal* TPB/SDGs di segala bidang, baik di dalam pelaksanaan Diplomasi Parlemen atau program-program BKSAP, termasuk di dalamnya kegiatan Panja BKSAP mengenai Kerjasama Pasifik Selatan dan Panja BKSAP tentang Organisasi Internasional. Selain itu, pemahaman dan implementasi TPB/SDGs yang semakin baik akan semakin memperkuat peran DPR-RI untuk mengawasi Pemerintah di TPB/SDGs. Goal-goal SDGs akan dibahas secara lebih detail dan spesifik, dilaksanakan dan dievaluasi dimana kekurangan-kekurangan dan tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan pada tahun 2030 goal-goal tersebut dapat Indonesia capai. Disinilah kekuatan peran Parlemen khususnya DPR-RI di dalam memastikan TPB/SDGs tercapai sesuai target di tingkat nasional dan dapat menjadi *role model* di tingkat regional dan internasional.

Pada periode yang lalu, BKSAP DPR-RI membentuk Panitia Kerja (Panja) TPB/SDGs. Panja tersebut cukup dikenal di forum-forum internasional yang membahas isu SDGs dan beberapa negara bahkan telah menjadikan Panja SDGs BKSAP ini sebagai *role model* di Parlemen/negaranya. Di tingkat nasional, Panja SDGs BKSAP juga telah berhasil membuka mata Pemerintah untuk melibatkan (mengengage) DPR-RI untuk pencapaian TPB/SDGs di Indonesia.

Pada periode ini, dibentuk Panja Organisasi Internasional, dengan tujuan memperkuat peran BKSAP sebagai focal point pelaksanaan SDGs Indonesia di tataran internasional, dan membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders.

Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Meningkatnya pemahaman anggota DPR terhadap target-target SDGs dan prosesnya.	Jumlah FGD dan seminar mengenai SDGs/TPB	Meningkatnya peran Parlemen di bidang pengawasan terhadap Pemerintah agar implementasi TPB/SDGs Indonesia sesuai/ <i>on track</i>
DPR-RI sebagai penunjang keberhasilan Indonesia dalam TPB/SDGs secara nasional, bersama-sama dengan Pemerintah dan multi stake holder lainnya	Meningkatnya pertemuan dengan stakeholders	Indonesia sebagai salah satu leader di forum internasional (baik di Pemerintah maupun Parlemen) dalam SDGs. Dalam hal ini Indonesia dapat berbagi <i>best practices</i> nya ke negara lain dan menjadi <i>role model</i> parlemen yang mendorong percepatan SDGs
BKSAP DPR-RI yang terdiri dari lintas fraksi dan komisi di DPR-RI dapat menyerap aspirasi dari daerah-daerah/dapil di Indonesia terkait diseminasi dan sosialisasi TPB/SDGs agar segera tercapai	Tersedianya panduan dan publikasi untuk anggota DPR untuk mengecek kesiapan daerah konstituen melaksanakan SDGs	seluruh daerah atau provinsi di Indonesia telah siap dan dapat mencapai goal-goal TPB/SDGs sesuai target
BKSAP DPR-RI dapat menjadi <i>frontliner</i> informasi internasional tentang isu kesehatan, terutama di masa pandemic COVID-19	Publikasi informasi-informasi akurat dan terbaru mengenai COVID-19 terutama bagaimana parlemen dunia mengatasinya	Menjadikan BKSAP sebagai gerbang informasi terdepan tentang isu internasional

Enam : Mendorong Terwujudnya Perdamaian Dunia dan Stabilitas di Kawasan

VI

Menjalankan mandat Konstitusi untuk ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia di kawasan regional Asia Tenggara. Demikian pula *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* memiliki nilai strategis bagi DPR RI sebagai inti dari diplomasi parlemen Indonesia di kawasan regional. AIPA ditujukan untuk mendorong percepatan terbentuknya Masyarakat ASEAN sebagaimana dicita-citakan oleh *ASEAN Community Vision 2025*. ASEAN menganut prinsip konsensus dan prinsip *Non-Interference* dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, sementara Indonesia menganut politik luar negeri berdasarkan prinsip bebas-aktif. Maka, DPR RI berpeluang untuk memainkan peran untuk menyuarakannya dengan lebih terbuka dan lugas. Beberapa persoalan keamanan seperti krisis kemanusiaan di Rakhine State Myanmar, krisis Muslim Uighur di Tiongkok, sengketa wilayah maritim di Laut Natuna Utara.

Di tingkat internasional, Timur Tengah telah menjadi kawasan dengan intensitas konflik yang sangat tinggi selama berabad-abad dan berpotensi mengancam stabilitas dan perdamaian dunia di masa kini. Selain itu, konflik bersenjata yang menyengsarakan masyarakat sipil juga terjadi di belahan bumi lainnya yang belum terselesaikan hingga kini dan berdampak pada stabilitas kawasan regional ASEAN, seperti konflik Semenanjung Korea, konflik Afghanistan, isu nuklir Iran, eskalasi politik di wilayah-wilayah bekas Uni Soviet, dan masih banyak lagi. Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memiliki peran penting untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dunia yang sejalan dengan mandat Konstitusi.

Sebagai negara mayoritas muslim terbesar dan negara demokrasi presidensial terbesar di dunia, DPR RI diharapkan memainkan peran penting dalam merespon isu-isu negara muslim dan demokrasi. DPR RI menaruh perhatian besar dan secara konsisten mendorong perdamaian di Timur Tengah di berbagai forum antar parlemen, khususnya isu kemerdekaan Palestina, proliferasi nuklir Iran, dan isu Arab Springs : konflik Suriah, Yaman dan Irak.

Keterlibatan DPR RI terhadap pembahasan isu-isu di kawasan Timur Tengah sangatlah aktif dan dilaksanakan melalui mekanisme bilateral dan multilateral dalam kerangka organisasi antar- parlemen *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, dan *Parliamentarians for Al Quds*.



Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Memperkuat <i>leading role</i> parlemen Indonesia di berbagai forum antar parlemen stabilitas kawasan Asia Tenggara	Usulan atau inisiatif DPR RI diakomodir dalam hasil sidang/konferensi internasional (<i>outcome document</i>)	Meningkatkan kredibilitas Parlemen Indonesia dalam isu-isu <i>high politic</i> seperti hubungan internasional, perdamaian dunia, dan pertahanan
Meningkatkan peran DPR RI dalam merespon isu demokrasi dan mendorong perdamaian di Timur Tengah	DPR RI diakui sebagai mitra strategis dalam isu-isu perdamaian di Timur Tengah di berbagai forum internasional	Meningkatkan kontribusi DPR RI dalam menyuarakan Indonesia sebagai negara demokratis dan damai dengan mayoritas muslim terbesar di dunia
	Jumlah FGD, seminar internasional dan regional yang diinisiasi oleh DPR RI	

Tujuh : Penguatan Kerjasama Parlemen Dalam Kerangka Kerja Kawasan Pasifik

VII

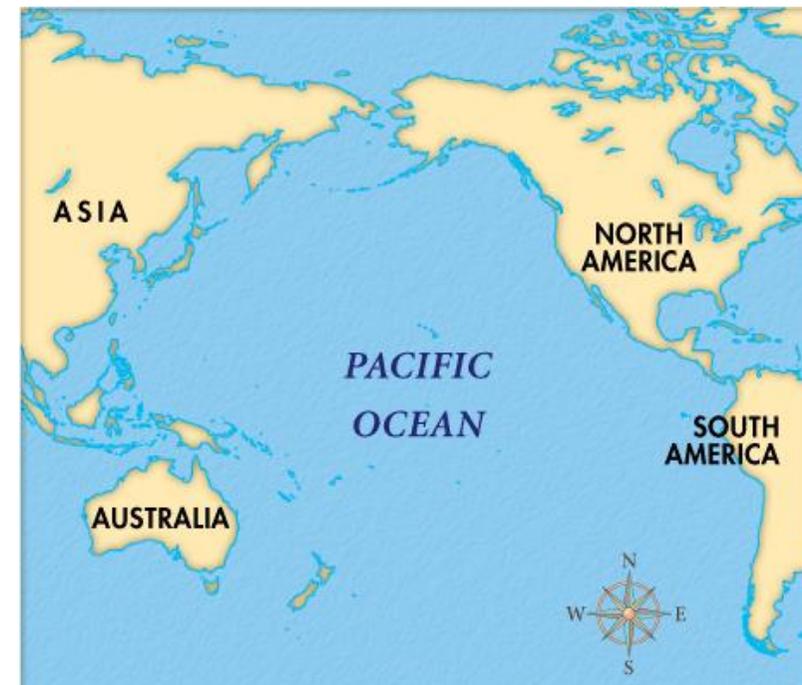
Meluaskan diplomasi parlemen Indonesia di kawasan Pasifik

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Letak geografis Indonesia ini sangat strategis karena menjadi pertemuan lintasan jalur perdagangan dan pelayaran dunia, termasuk jalur perdagangan dari Asia ke Australia dan Selandia Baru karena berbatasan langsung dengan Pasifik.

Keterlibatan DPR RI di kawasan Pasifik ini dimulai dengan peran DPR RI sebagai salah satu *founding father Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* pada tahun 1991, yaitu organisasi antar-parlemen dari negara anggota *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* yang didirikan pada tahun 1989 sebagai komunitas antar-pemerintah untuk mendorong kesejahteraan melalui kerja sama ekonomi yang lebih efektif di kawasan Asia-Pasifik.

Selama beberapa dekade terakhir ini, kawasan Asia - Pasifik menjadi salah satu kawasan paling sibuk di dunia dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi serta mengalami pergeseran geo-strategi dan geo-politik akibat perkembangan global. Terbentuknya *Pacific Islands Forum (PIF)* pada tahun 1999 dan perannya yang cukup kuat di forum PBB, menyadarkan DPR RI untuk mengubah strategi diplomasi parlemen. Kerjasama regional melalui kerangka kerja sama multilateral *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* sudah tidak mencukupi lagi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah NKRI di kawasan Asia – Pasifik. DPR RI perlu memainkan peran “*leading role*” di kawasan Asia – Pasifik.

DPR RI kemudian menginisiasi penyelenggaraan konferensi pertama *Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* dengan tema utama “*Human Development and Maritime Sustainability*” pada tanggal 24-25 Juli 2018 di Jakarta. Sidang IPPP tersebut menghasilkan *Chairs’ Statement* yang memuat kesepakatan berupa “komitmen untuk saling terlibat di masa mendatang dan menyepakati untuk mengeksplorasi inisiatif program kerja sama antar parlemen, termasuk melalui kerjasama teknis untuk mendukung kinerja parlemen, *workshop/seminars* dan program-program lainnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.



Di periode ini, BKSAP mendorong pelaksanaan dari berbagai komitmen dari hasil pelaksanaan IPPP yang pertama, serta mendorong Pertemuan IPPP tersebut untuk menjadi pertemuan rutin dan menghasilkan keputusan guna memperkuat kemitraan Indonesia dan Pasifik di berbagai bidang, khususnya melalui mekanisme Kerja Sama Selatan – Selatan dan Triangular.

Selain itu, DPR RI melalui BKSAP juga membentuk Panitia Kerja (Panja) Kerja Sama Kawasan Pasifik untuk menyusun rencana aksi parlemen berkelanjutan guna memperkuat kerja sama kemitraan Indonesia – Pasifik di masa mendatang.

DPR RI untuk memainkan peran *leading role* di kawasan Pasifik, dengan dua tujuan, yaitu: pertama, menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan melalui meningkatkan kerja sama kemitraan di bidang ekonomi, lingkungan hidup dan sosial budaya, dan kedua bahwa kerjasama kemitraan Indonesia – Pasifik akan lebih menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat bersama di masa depan.

Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Kesepehaman antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tentang perdamaian dan kesejahteraan kawasan	Meningkatnya dialog multilateral melalui skema IPPP	Meningkatkan keterhubungan/ konektivitas DPR RI dengan Parlemen-Parlemen di Pasifik
	Meningkatnya jumlah kerjasama teknis antar parlemen	

Delapan : Mendukung Keterbukaan Parlemen (*Open Parliament*)

VIII

DPR RI dapat menjadi “role model” sebagai parlemen yang modern, terbuka dan demokratis sehingga memperkuat nilai diplomasi parlemen DPR RI

Pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-73, DPR RI mendeklarasikan inisiatif *Open Parliament* DPR-RI. *Open Parliament* merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Tujuan dari terselenggaranya *Open Parliament* selaras dengan inisiatif *Open Government Partnership* (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan satu dari 8 negara pendiri (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat) *Open Government Partnership*.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi satu komitmen besar untuk mewujudkan parlemen yang terbuka, representatif, inklusif, akuntabel dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Deklarasi tersebut merupakan wujud komitmen yang telah mulai dibangun DPR sejak memvisikan Parlemen Modern sebagai parlemen abad ini hingga kemudian terbangun dialog, diskusi dan wacana-wacana melalui rentetan kegiatan internasional seperti Global Legislative Openness Conference (2017) hingga OGP Summit (2018).

Berbekal momentum, DPR menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen (*Open Parliament*) dan kemudian memutuskan untuk mewujudkannya secara terpisah dari Pemerintah. Perlu diketahui, Pemerintah secara periodik menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah untuk disampaikan ke OGP dalam siklus dua tahunan. Sejak berdirinya OGP hingga saat ini, Indonesia telah menyampaikan lima kali Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah. *Political will* DPR yang menguat untuk meningkatkan *good governance* mendorong lembaga legislatif tersebut untuk menyampaikan rencana keterbukaan bersamaan dengan periode penyampaian rencana aksi pemerintah untuk periode 2018-2020.

Rencana Aksi Nasional *Open Parliament Indonesia* (OPI) 2018-2020 yang disusun terdiri dari lima rencana aksi yaitu: (i) Peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi; (ii) Peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen; (iii) Penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI; (iv) Penyusunan peta jalan atau *roadmap* OPI; (v) Penyusunan kelembagaan OPI.

Agenda *Open Parliament* bukan merupakan agenda baru dalam lingkup internasional. Setidaknya sejak berdirinya OGP hingga disetujuinya *Declaration on Parliamentary Openness* di sela-sela World e-Parliament Forum di Roma, 2012, wacana parlemen terbuka telah menyeruak ke permukaan. Pada 2013, OGP membentuk Kelompok Kerja yang diberi nama *Legislative Openness Working Group* (LOWG) untuk memacu komitmen-komitmen keterbukaan legislatif yang menggeliat di OGP.

Prinsip utama konteks multilateralisme OGP dalam OPI tetap harus diikuti yakni baik proses penyusunan, pelaksanaan hingga monitoring dilakukan dalam proses *co-creation* (bersama- sama) dengan masyarakat sipil. Selain itu, sejumlah ketentuan-ketentuan internasional dalam OGP akan menjadi panduan penguat peran diplomasi parlemen ke depan, mengingat BKSAP menjadi pengawal komitmen OPI sekaligus *amplifier* dari progress DPR tentang *Open Parliament* ke dunia internasional. Terlebih dengan melihat status perkembangan *Open Parliament*, DPR dapat menjadi pionir dalam pendorong keterlibatan di skema multilateral ini. Di Asia, DPR tercatat sebagai parlemen yang kali pertama menyampaikan Renaksi Keterbukaan terpisah dari pemerintah. Sementara di level global, DPR adalah satu dari 20 besar parlemen yang menyampaikan Renaksi Keterbukaan (terpisah).

Dengan bergabung di komunitas internasional untuk rezim keterbukaan, maka, DPR dapat menilai dan melakukan asesmen sejauh mana level keterbukaan yang dimiliki apabila disandingkan dengan mitra seajar lainnya (*peer review*). Selain itu, DPR juga akan mendapatkan dukungan internasional untuk mendorong upaya-upaya menuju keterbukaan, baik dalam hal advokasi maupun bantuan teknis hingga dukungan kajian-kajian yang dapat bermanfaat untuk mendorong keterbukaan, memanfaatkan teknologi IT dan juga memperkuat representasi publik.

Pada 2019, Ketua OGP Steering Committee telah merilis visi ke depan untuk OGP dengan rujukan kata *Open Parliament* sedikitnya empat kali. OGP berkomitmen menuju *Open State* yang meliputi tidak hanya *Open Government*, tapi juga *Open Parliament* dan *Open Justice*. Terkait hal ini, ke depan OGP juga akan mengidentifikasi tokoh-tokoh unggulan dalam isu-isu tematik termasuk *Open Parliament* untuk tergabung dalam proyek percontohan mereka yakni *OGP Leaders Program*.

Potensi untuk menjadi pionir dalam parlemen terbuka sangat tinggi dan diplomasi parlemen menjadi salah satu kunci untuk menggaungkan *leadership* DPR dalam isu *Open Parliament*. Terlebih dengan adanya ragam pemangku kepentingan internasional yang berkomitmen kuat mendorong *Open Parliament* seperti *Open Parliament e-Network* (OPeN) hingga ParlaAmericas maupun GOPAC. BKSAP sebagai *Parliamentary Focal Contact* untuk memfasilitasi interaksi proses dengan *Open Government* di tingkat nasional dan juga dengan OGP di tingkat internasional, maupun dengan berbagai organisasi.



Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Mewujudkan DPR-RI yang akuntabel	Tersampainya kegiatan-kegiatan Dewan secara positif kepada masyarakat	Kepercayaan publik kepada DPR RI meningkat
	Jumlah unggahan konten kegiatan di sosial media	
	Meningkatnya nilai keterbukaan berdasarkan hasil survey/review lembaga survey internasional	
Menjadikan DPR-RI yang modern berbasis teknologi dan terbuka/transparan dan demokratis	Tersedianya media sosial yang update dan partisipatif terhadap publik	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas di DPR-RI
	Report yang disampaikan BKSAP ke organisasi-organisasi internasional mengenai achievement yang dicapai oleh DPR RI	Parlemen Indonesia khususnya DPR-RI dapat menjadi <i>role model</i> bagi negara-negara lain

Sembilan : Digitalisasi Diplomasi Parlemen

IX

Diplomasi parlemen yang didukung dengan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk interaksi yang lebih luas dengan masyarakat

Era Revolusi Industri 4.0, membawa perubahan signifikan tidak hanya dalam dunia industri namun didalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Kemajuan pertama dari revolusi industri 4.0 adalah *Internet of thing*, dimana segala sesuatu itu bisa diketahui dengan internet bahkan tidak lagi menggunakan komputer yang besar, cukup dengan smartphone maka segala sesuatu dapat terhubung kesana. Internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar orang. Bekerja, berkomunikasi dengan internet, kemajuan lainnya adalah cloud computing.

Begitupula yang terjadi di DPR RI, sesuai visinya untuk menjadi Lembaga Perwakilan yang modern, di Era Revolusi Industri 4.0 ini, DPR RI memaksimalkan penggunaan internet, menyediakan sistem informasi dan pemutakhiran penggunaan teknologi didalam aktivitas kegiatannya. DPR RI juga sedang mengupayakan adanya *one Big Data* sebagai Bank Data dari tempat penyimpanan dan pengolahan dokumen-dokumen penting yang ada di DPR RI. Sistem digital dalam era teknologi saat ini sangat penting dan saat ini segala hal sudah dapat diatasi secara komputerisasi apalagi sekarang sudah didukung dengan teknologi mobile. Bahkan banyak hal saat ini semakin dimudahkan dengan aplikasi android di smartphone. Sistem Digital dalam penerapannya mendukung terwujudnya *Paperless Office* yang merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengelola administrasi baik kantor maupun suatu instansi untuk menggunakan kertas seminimal mungkin dan mendigitalisasi laporan dengan teknologi yang tersedia. Dengan Paperless maka dapat memperoleh banyak keuntungan antara lain memudahkan penyimpanan, memudahkan pengambilan keputusan, optimalisasi pekerjaan, meningkatkan pelayanan dan konektifitas tanpa batas. Misalnya dalam pelaksanaan diplomasi parlemen, ada banyak sekali intervensi yang harus disiapkan maupun draft resolusi dan apabila tidak terstruktur dengan baik dalam penyimpanan maupun dokumentasinya maka akan timbul banyak hal yang dapat menghambat pekerjaan dalam diplomasi parlemen.

Untuk itu maka dalam melaksanakan fungsi Diplomasi Parlemen, sistem digital dan digitalisasi mutlak diperlukan. Untuk menuju kearah sana, maka diperlukan adanya digital transformation, yaitu bagian proses dari teknologi yang lebih besar, dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kegiatan diplomasi parlemen. Transformasi Digital dapat dianggap sebagai tahap ketiga dari merangkul teknologi digital yang berada pada urutan kompetensi digital → penggunaan digital → transformasi digital.

Ketika merencanakan untuk transformasi digital, maka harus mengenali faktor perubahan budaya yang akan dihadapi baik bagi pegawai dan Anggota DPR RI sebagai pelaku diplomasi parlemen agar dapat menyesuaikan diri saat mengadopsi teknologi digital ini. Transformasi Digital telah memunculkan tantangan yang unik sekaligus peluang dimana organisasi harus bersaing dengan gesit terhadap para pesaing yang mengambil keuntungan dari rendahnya hambatan dalam menyediakan teknologi baru.

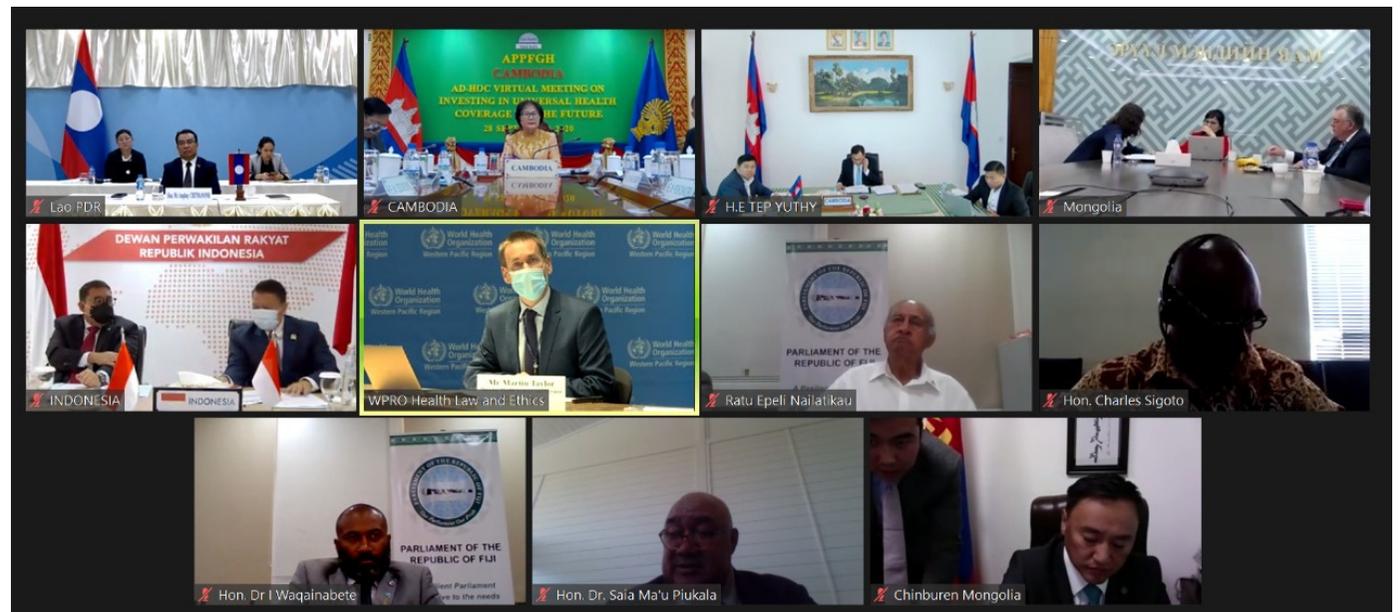
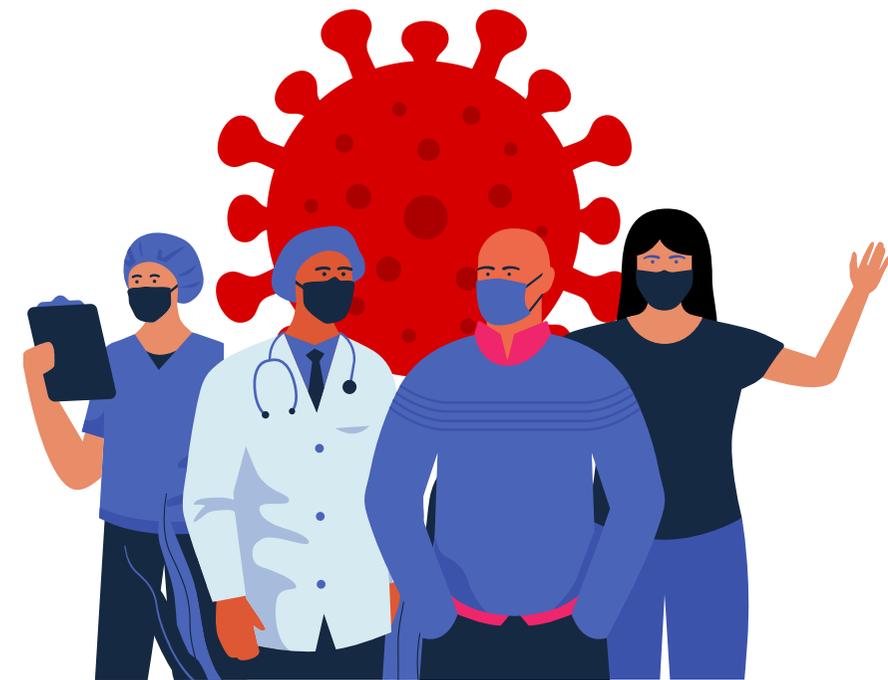
Laporan IPU World e-Parliament 2016 menggambarkan bahwa, "tantangan tidak hanya masalah mengadopsi teknologi; namun justru terkait masalah strategik dan perlu diatasi pada tingkat sistemik

Sasaran	Indikator keberhasilan	Manfaat
Transformasi Digitalisasi Diplomasi Parlemen	Memodernisasi website dan adaptasi agar bisa diakses dengan baik di semua jenis perangkat HP, dan social media BKSAP yang up-to-date	Sebagai media informasi bagi masyarakat dan wujud akuntabilitas kinerja BKSAP kepada masyarakat
	Tersedianya Database Isu-isu Internasional/ Bank Data	Database sebagai depository dalam penyusunan posisi parlemen pada sidang berikutnya dan rekam jejak kegiatan diplomasi parlemen yang telah dilakukan BKSAP
	Tersedianya Sistem Perjalanan Luar Negeri Anggota Dewan yang terintegrasi	Bahan pengambilan kebijakan bagi Pimpinan DPR RI dalam memberikan pertimbangan bagi AKD yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri dan bagian dari akuntabilitas kinerja DPR RI yang disimpan dalam database
	Tersedianya aplikasi BKSAP Hub (Digitalisasi materi dan informasi umum dari sebuah sidang)	Memudahkan anggota delegasi untuk berpartisipasi dalam sidang.
	Meningkatnya jumlah aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan optimaliasi kinerja	

Diplomasi Parlemen merespon Pandemi

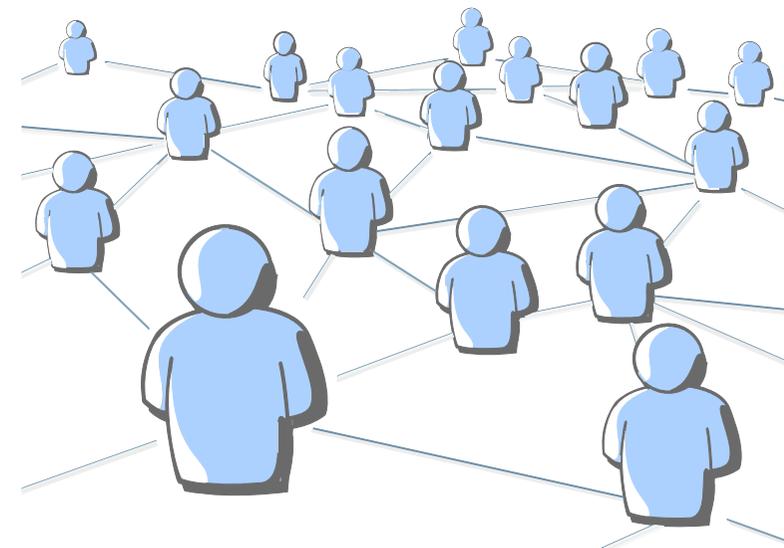
Pada awal tahun 2020, seluruh negara di dunia menghadapi tantangan global berupa pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pada ekonomi dan sosial-budaya serta pada agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kondisi ini menjadi sebuah peluang bagi negara-negara untuk memperkuat solidaritas dalam bentuk kerjasama, baik dalam kerangka bilateral dan multilateral. Dalam hal ini parlemen sebagai pilar demokrasi yang merepresentasikan masyarakat juga memainkan peran penting untuk mendorong kerjasama antar parlemen.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas lintas negara hingga ke lingkungan domestik sekalipun. Walaupun demikian, DPR RI tetap melaksanakan mandat diplomasi parlemen dengan menginisiasi beberapa pertemuan bilateral dan berpartisipasi aktif di sidang multilateral secara virtual. Dengan berbagai upaya diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI, diharapkan dapat terwujud solidaritas global berdasarkan prinsip kolaborasi.



Faktor/Kondisi Pendukung (Enablers)

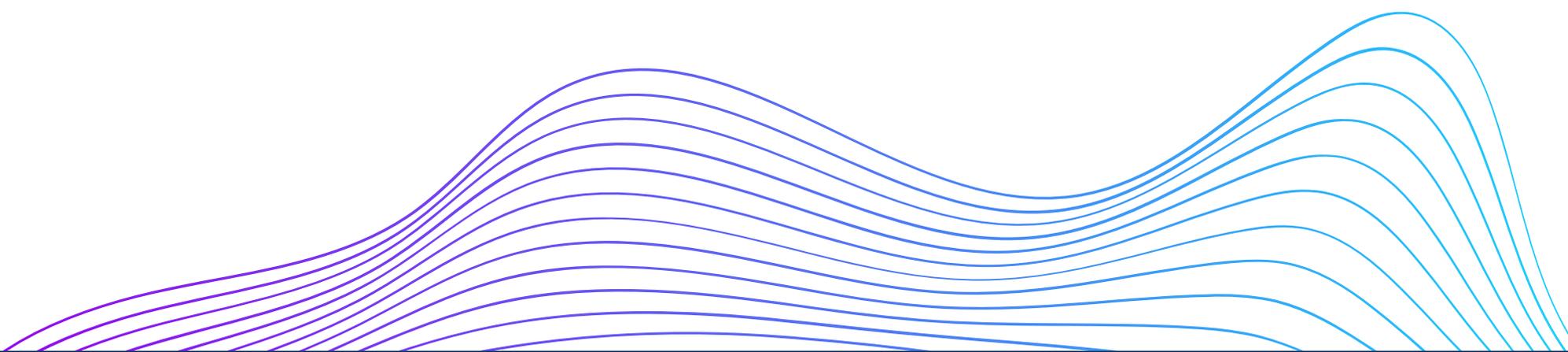
- Sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia yang memfasilitasi pelibatan semua elemen dalam politik luar negeri.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagai landasan hukum fungsi representasi dan diplomasi parlemen.
- Indonesia mendukung implementasi multilateralisme yang menekankan pada kerja sama multipihak untuk mencapai kepentingan bersama.
- Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) menyediakan sarana dan prasarana dengan teknologi digital yang memadai untuk menunjang kinerja DPR RI sebagai parlemen modern, terbuka dan akuntabel.
- Supporting system Dewan memadai untuk menyediakan dukungan teknis, substansi dan keahlian.



PENUTUP

Diplomasi parlemen merupakan bagian integral dari hubungan internasional dewasa ini. DPR RI yang mendapat mandat konstitusi untuk melaksanakan diplomasi parlemen dapat memainkan peran penting bahkan peran memimpin dalam keterlibatan Indonesia dengan negara-negara lainnya. “Rencana Strategis Diplomasi Parlemen” ini disusun sebagai referensi bagi DPR RI dalam melaksanakan diplomasi parlemen selama lima tahun kedepan agar hasilnya dapat bermanfaat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Serta mencerminkan perwakilan dari sistem demokrasi dengan parlemen modern yang melaksanakan penuh fungsi dewan (legislasi, anggaran, pengawasan, representasi, dan diplomasi).





BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2020

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270
Tel: +6221-5715814 | Fax: +6221-5732132
Email: biro_ksap@dpr.go.id

 BKSAP DPR RI

 @bksapdpri

 @bksapdpri

 BKSAP DPR RI